

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
WONUA MONAPA KECAMATAN MOWILA KONAWE
SELATAN SULAWESI TENGGARA**

SKRIPSI

**OLEH :
AJENG SINTYA AMBARWATI
105710210614**



**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
WONUA MONAPA KECAMATAN MOWILA KONAWE
SELATAN SULAWESI TENGGARA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi

Disusun dan diajukan Oleh :

AJENG SINTYA AMBARWATI

105710210614

Kepada :

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

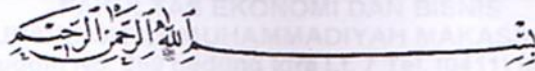
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2018



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

Nama Mahasiswa : Ajeng Sintya Ambarwati

No. Stambuk/NIM : 105710210614

Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah Diteliti, Diperiksa dan Diujikan Di Depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada Hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2018.

Makassar, 11 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Andi Jam'an, MM

NIDN. 0902116603

Pembimbing II,

Sitti Marhumi, SE, MM

NIDN. 0901126906

Mengetahui,

Ketua Program Studi IESP,



Ismail Rasulong, SE.,MM

NBM : 903 078

Hj. Naidah, SE, M.Si

NBM. 710 551



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Ajeng Sintya Ambarwati, NIM: 105710210614, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: M, 29 Dzulkaidah 1439 H/ 11 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi IESP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulkaidah 1439 H

Makassar, -----
 11 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

- 1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
- 2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE, M.Si. AK. CA (.....)
 2. Drs. H. Sanusi A.M., SE, M.Si (.....)
 3. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (.....)
 4. Hj. Naidah SE., M.Si (.....)



Disahkan Oleh :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong SE,MM
 NBM: 903 078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : AJENG SINTYA AMBARWATI

Nomor Stambuk/NIM : 105710210614

Program Studi : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

Judul Penelitian : "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila Konawe Selatan Sulawesi Tenggara"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 11 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



AJENG SINTYA AMBARWATI

Diketahui Oleh:

Dekan



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua Program Studi IESP,

Hj. Naidah SE., M.Si
NBM: 710 561

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila Konawe Selatan Sulawesi Tenggara”**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak **“Muhammad Aminuddin”** dan Ibu **“Mirawati Sultan SsT”** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak **Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Ismail Rasulong, SE., MM**, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu **Hj. Naidah, SE., M.Si**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Dr. Andi Jam'an, MM**, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu **Sitti Marhumi, SE.,MM**, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak meluangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti ilmiah.
7. Segenap staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 11 Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

Ajeng Sintya Ambarwati. 2018. Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Dibimbing oleh Andi Jam'an dan Sitti Marhumi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelayanan kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Wonua Monapa yaitu 783 orang dan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Jumlah responden sebanyak 89 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan SPSS dihasilkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.152 yang berarti bahwa variabel tidak bebas (Y) pada model dijelaskan oleh variabel bebas (X) secara bersama-sama sebesar 15.2 %. Sisanya 84.8% di pengaruh oleh variabel bebas lainnya yang tidak di masukkan dalam model. Dapat diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf kepercayaan 95% ($7.72 > 3.95$) yang berarti variabel bebas secara keseluruhan (simultan) berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara parsial Pendidikan berpengaruh tapi tidak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan Pelayanan kesehatan berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila.

Kata kunci : *Kesejahteraan, Pendidikan, Pelayanan Kesehatan*

ABSTRACT

AjengSintya Ambarwati.2018.*Factors Influential Against the Level of Welfare Society in WonuaMonapa Village, MowilaKonawe Selatan District Southeast Sulawesi. Guided by AndiJam'an and SittiMarhumi.*

This study aims to determine the effect of education and health services on community welfare in WonuaMonapa Village, MowilaKonawe Selatan District Southeast Sulawesi.

The population in this study is the entire community in the village of WonuaMonapa is 783 people and the sampling technique using slovin formula. The number of respondents was 89 people. Data analysis used is multiple linear regression analysis

The result of analysis using SPSS resulted in the determination coefficient (R²) of 0.152 which means that the independent variable (Y) in the model is explained by the free variable (X) together of 15.2%. The remaining 84.8% is influenced by other independent variables that are not included in the model. $F_{count} > F_{table}$ at 95% confidence level ($7.72 > 3.95$), which means that the independent variable as a whole (simultaneous) has a real effect on the welfare of society. Partially Education is influential but not real for the welfare of society and health service have real effect to welfare of society in WonuaMonapa Village Mowila Sub-district.

Keywords : *Welfare, Education, Health Services*

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pemerintah Daerah.....	10
B. Kesejahteraan	14
C. Pendidikan.....	21

D. Pelayanan Kesehatan.....	24
E. Tinjauan Empiris.....	27
F. Kerangka Konsep.....	30
G. Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Definisi Operasional Variabel (DOV).....	33
D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian.....	47
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
Tabel 3.1	Populasi dan Sampel	35
Tabel 4.1	Data Jumlah Penduduk Desa Wonua Monapa	44
Tabel 4.2	Klarifikasi Penduduk Menurut Ijazah yang Ditamatkan	45
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana	46
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda	47

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Tabel 2.1	Kerangka Konsep	35

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Data Responden di Desa Wonua Monapa	52
2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	56
3. Peta Kecamatan Mowila	58
4. Dokumentasi Penelitian	59
5. Surat Izin Penelitian	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab II pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Pendidikan di sekolah difokuskan dalam bentuk pembinaan dalam aspek akademik, non akademik, dan sikap/mental spiritual. Pembinaan aspek akademik di sekolah meliputi kegiatan yang tergabung dalam kegiatan kurikuler, aspek non akademik meliputi kegiatan ekstrakurikuler, dan pembinaan untuk sikap mental/spiritual meliputi kegiatan sholat jamaah bersama dan doa bersama.

Menurut Nurkolis Kendala (2003), yang dihadapi di negeri ini untuk mencapai pendidikan yang berkualitas antara lain:

1. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih sangat rendah karena terlalu kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam manajemen mikro penyelenggaraan pendidikan.
2. Penggunaan sumber daya tidak optimal dan tidak efisien dikarenakan rendahnya anggaran pendidikan dan sistem pengelolaan anggaran yang terpusat.
3. Partisipasi masyarakat yang masih rendah padahal secara historis peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia sangat besar
4. Sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya, seperti perubahan politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang terjadi dengan cepat.

Peningkatan mutu pendidikan berkaitan erat dengan adanya pelayanan pendidikan yang bermutu, yang dimaksud dengan mutu pelayanan pendidikan adalah adanya penjaminan layanan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang sesuai dengan standar pelayanan pendidikan di daerah yang telah ditetapkan dan mampu memenuhi keinginan para siswa, masyarakat (kepuasan pelanggan). Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia dalam bidang pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Salah satunya adalah proses pemberian layanan pendidikan yang masih jauh dari harapan. Kualitas pendidikan yang relatif masih rendah.

Rendahnya kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh: kurang memadainya ketersediaan pendidik dalam hal jumlah dan kualitas, rendahnya kesejahteraan pendidik, belum mencukupinya fasilitas belajar beserta sarana dan prasarana pendukungnya, dan masih tingginya biaya operasional pendidikan. Di

satu pihak pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, di pihak lain pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin tingginya kehidupan masyarakat telah semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. Sebagaimana Nanang Fattah (2004) mengemukakan, bahwa: "Semakin tinggi kehidupan sosial masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah semakin meningkatkan tuntutan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat.

Pada akhirnya tuntutan tersebut bermuara kepada pendidikan, karena masyarakat meyakini bahwa pendidikan mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai institusi tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah juga mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, dengan adanya program wajib belajar 9 tahun di harapkan pola pikir masyarakat Indonesia semakin berkembang, pada saat ini pemerintah juga mengadakan program BOS (bantuan operasional sekolah), BOS ini di harapkan tidak ada lagi masyarakat yang putus sekolah dikarenakan masalah biaya pendidikan, pemerintah juga mengadakan program kejar paket, program ini biasanya diikuti oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang putus sekolah, program ini terdiri dari program paket A (setara SD), program paket B (setara SLTP), program paket C (setara SLTA).

Walaupun pemerintah telah melaksanakan program-program di atas tetapi kesejahteraan masyarakat di desa wonua monapa kecamatan mowila konawe

selatan masih rendah. Menurut Todaro (2000) alasan pokok mengenai pengaruh dari pendidikan formal terhadap distribusi pendapatan adalah adanya korelasi positif antara pendidikan seseorang dengan penghasilan yang akan diperolehnya. Adalah benar bahwa seseorang yang dapat menyelesaikan pendidikan menengahnya atau perguruan tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang hanya mampu menyelesaikan sekolah yang lebih rendah tingkatannya, penghasilan mereka akan berbeda antara 300 hingga 800 persen. Oleh karena itu tingkat pendapatan akan tergantung pada tahun-tahun sekolah yang dapat diselesaikannya, maka hal itu akan mendorong terjadinya perbedaan pendapatan yang sangat tidak adil dan menimbulkan jurang kemiskinan.

Keluarga yang sejahtera merupakan keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhannya, dan disebut sebagai keluarga berkualitas, dengan terpenuhinya kebutuhan dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama. Dalam sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan erat dengan besaran pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan dan dikeluarkan sebagai bentuk konsumsi untuk mencapai kesejahteraan. Sebagaimana penelitian oleh Wagle et al. (2006), menyatakan : *“Income and consumption are straightforward and extremely useful measures of economic welfare, as they capture the means by which individuals and households can achieve human well-being. Income and consumption tend to highly correlate with each other because consumption derives from income and income is essential for consumption.”* Dapat diartikan bahwa pendapatan dan konsumsi merupakan

variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan, karena baik secara individu maupun rumah tangga dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) pernah diperkenalkan oleh Spicker (Suharto, 2005) yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

Istilah kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti, yakni:

1. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan kondisi manusia yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai.
2. Dalam tinjauan ekonomi, sejahtera selalu dihubungkan dengan keuntungan atau manfaat kebendaan (ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial (secara formatif dan substantif bisa bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi).

3. Dalam tinjauan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara kesejahteraan (*welfare state*).
4. Dalam tinjauan lain (seperti fenomena kebijakan di negara maju seperti Amerika), sejahtera menunjuk ke aspek keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja; atau yang keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak cukup atau tidak layak secara manusiawi; atau jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan; atau bisa juga karena memiliki kondisi khusus, seperti adanya bukti sedang mencari pekerjaan (menganggur); atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban untuk menafkahi keluarga atau menjaga anak (yang mencegahnya untuk dapat/bisa bekerja), karena di beberapa kasus negara penerima dana diharuskan bekerja, yang dikenal dengan istilah *workfare*. Hal ini, tampaknya berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, kasus Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLST) atau bentuk-bentuk bantuan lain yang lebih bersifat kedermawanan (*charity*), yakni tidak ada kewajiban atau keharusan bagi penerima untuk bekerja.

ada 385 jenis pelayanan publik yang disediakan aparatur pemerintah kepada masyarakat mulai dari urusan kelahiran sampai pada urusan kematian. Semua jenis pelayanan publik tersebut disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melayani masyarakat. Salah satu yang menjadi point adalah pelayanan publik yang dinilai sangat kurang memberikan kepuasan terhadap

masyarakat yaitu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat desa, terutama pada daerah-daerah yg dikategorikan sebagai daerah berkembang.

Dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas pelayanan itu di berikan serta biaya yang relatif terjangkau dan mutu pelayanan yang baik. Jadi, terdapat tiga unsur pokok dari pelayanan itu sendiri. Pertama, biaya harus relatif lebih rendah, kedua, waktu yang diperlukan, dan terakhir mutu pelayanan yang diberikan relatif baik.

Sehubungan dengan itu, aparatur pemerintah sebagai perencana dan pelaksana suatu model kebijakan pelayanan publik, di harapkan mampu memberikan suatu bentuk peningkatan pelayanan, khususnya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi kebijakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yaitu peningkatan manajemen pelayanan kepada masyarakat yang berbasis kemasyarakatan, memberikan jaminan kesehatan terpadu bagi masyarakat desa, dan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini para tenaga medis yang dinilai mampu memberikan segala bentuk tindakan yang sesuai kemampuan mereka, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mampu mendukung terciptanya suatu pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat desa.

Dalam penelitian ini, penulis sangat mengaharapkan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan

masyarakat desa dan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan dengan memperhatikan masalah yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa yaitu memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan, dan menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga medis yang dinilai mampu untuk bekerja dengan baik, serta sarana dan prasarana sebagai aspek pendukung tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat desa yang baik dan profesional, dan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu yaitu memberikan akses pendidikan yang layak seperti pendidikan gratis, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. kiranya proposal penelitian ini nantinya akan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari sebagai bahan referensi bagi penulis yang lain.

Dengan bertitik tolak pada penjelasan di atas, maka dari penulis menganggap bahwa hal tersebut merupakan bahan yang cukup menarik untuk dianggap menjadi bahan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara ?

2. Apakah pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Wonupa Monapa Kecamatan Mowila Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan kesehatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan sarana ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Secara praktis: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Wonua Monapa lebih memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat di Desa Wonua Monapa kecamatan Mowila.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 menjelaskan Pemerintahan daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selanjutnya dalam ayat 3, UU no.32 tahun 2004 menjelaskan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah. Dalam hal ini di maksudkan bahwa pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

Asas desentralisasi dalam hal ini sebagai suatu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Oleh karenanya daerah mempunyai kewenangan dalam -mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemerintah daerah dalam hal ini tidak lepas dari peran wilayah kecamatan sebagaimana yang terdapat dalam Ketentuan Umum No.22 1999 : 5 bahwa kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang meliputi wilayah kecamatan sebagai suatu wilayah

yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah bupati/walikota yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang merupakan rangkaian pemerintahan kecamatan.

Pemerintah wilayah kecamatan terdiri dari kepala kecamatan, (camat) dan perangkatnya seperti yang telah di uraikan bahwa tugas pemerintah kecamatan tidaklah ringan mengingat pemerintah kecamatan sebagai pelaksana pembinaan pemerintah desa sebagai tempat bertumpu dan berakhirnya tugas-tugas pemerintahan. Hal ini di tegaskan dalam penjelasan UU otonomi daerah bahwa dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah kecamatan adalah orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban sebagai pihak penyelenggara dan penanggung jawab di wilayah baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala kecamatan dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi di wilayah kecamatan sangat dibutuhkan kepemimpinannya guna menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang. Oleh karena itu peranan aparatur pemerintah secara hierarkis menempati posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan.

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kaitannya dengan Standar Pelayanan Publik

Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah ini bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam konteks desentralisasi kewenangan ini, pelayanan publik oleh pemerintah daerah seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik dengan fokus kepuasan penerima layanan/masyarakat.

“Dengan membandingkan upaya-upaya yang telah di lakukan oleh pemerintah dengan kondisi pelayanan public yang dituntut dalam era otonomi daerah, tampaknya apa yang di lakukan oleh pemerintah masih belum banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan kualitas pelayan publik, masih belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang di harapkan masyarakat” **(Agus Faar Syukuri 2010:4)**

Kaitanya dengan peran serta masyarakat dalam pembangunan, Sondang Siagian memiliki pandangan lain seputar administrasi pembangunan. Menurutnya, administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dengan adanya desentralisasi yang berlaku, peran serta pemerintah daerah dalam pembangunan mempunyai tempat tersendiri dalam proses penerapannya. Administrasi pembangunan adalah proses penggiringan suatu organisasi untuk mencapai prestasi puncak suatu tujuan pembangunan, ini merupakan pelaksanaan dan wadah administrasi dalam mengintegrasikan kemudahan mencapai objek-pembangunan (**Edward Weidner**).

Dalam pelaksanaannya sendiri pemerintah sebagai pelaksana dari pembangunan harus mempunyai manajemen dalam usaha pengembangan dan pemanfaatan dari pembangunan itu sendiri. Koordinasi antar-antar pejabat pemerintah merupakan salah satu faktor yang berperan penting agar terciptanya suatu prinsip pembangunan yang utuh dan terkendali, artinya sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan terpimpin, dalam hasil pelaksanaannya yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah di tetapkan (**Prof. Terry. Principles of Management, 1964**)

Berdasarkan bentuknya, layanan umum yang dilakukan oleh siapapun tidak terlepas dari 3 macam bentuk (**Moenir, 2006**)

a. Layanan dengan lisan.

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang Hubungan Masyarakat (Humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukannya.

b. Layanan melalui tulisan.

Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh, karena faktor biaya. Layanan melalui tulisan -merupakan bentuk layanan

yang paling menonjol. Dalam pelaksanaan tugas tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya.

c. Layanan tindakan

Pada umumnya layanan dalam bentuk tindakan 70-80% dilakukan oleh petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu, faktor-faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil pekerjaan dan perbuatan.

2. Sasaran Pelayanan Publik.

Sasaran manajemen pelayanan umum sederhana saja, yaitu kepuasan. Meskipun sasaran itu sederhana tetapi untuk mencapainya tidaklah mudah. Hal ini berkaitan dengan masalah kepuasan yang tidak dapat diukur dengan pasti, paling hanya dapat dikenali dari beberapa sudut. Dalam hubungannya dengan pelayanan public pengenalan kepuasan seseorang, dalam hal ini pihak yang memperoleh layanan untuk mendapatkan haknya, terdapat semacam ukuran yang umum tetapi sangat relative yaitu apabila ia dapat menerima perlakuan dan hasil berupa hak dengan kegembiraan dan keikhlasan.

B. Kesejahteraan

1. Kesejahteraan

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih aman dan nyaman.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat meliputi: pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Dalam penelitian ini, kesejahteraan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia; sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu; orang banyak; khalayak ramai. Sedangkan Horton dan Hunt mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut BKKBN (2014) keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan

pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

(Fahrudin, 2012) Menurut Prabawa (1988) kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga.

Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Rambe, 2011).

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- a. Rasa aman (*security*),
- b. Kesejahteraan (*welfare*),
- c. Kebebasan (*freedom*),
- d. Jati diri (*identity*).

Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Kolle (dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.;
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Indikator kesejahteraan diatas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lain. Adapun pengertian mengenai kesejahteraan keluarga di Indonesia oleh pemerintah selama ini dikelompokkan kedalam dua tipe (Suyoto, 2004) yaitu pertama, tipe keluarga pra-sejahtera adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan untuk memnuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Kedua, Tipe Keluarga Sejahtera.

Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap

penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. Secara nasional terdapat dua versi pengukuran kesejahteraan keluarga yaitu pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut (Badan Pusat Statistik, 2013) untuk mengukur tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari 7 indikator antara lain:

1. Kependudukan
2. Pendidikan Ada 3 indikator yang dilihat yaitu:
 - a. Angka Partisipasi Sekolah.
 - b. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan
 - c. Angka buta huruf.
3. Kesehatan Untuk itu dapat dilihat dari Angka Kesakitan.
 - a. Penolong Kelahiran.
 - b. Angka Harapan Hidup.
4. Fertilitas dan Keluarga Berencana
5. Pola Konsumsi
6. Ketenagakerjaan Status pekerjaan menjadi 7 (macam), yaitu :

berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja keluarga.
7. Perumahan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2014) menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, adapun indikatornya sebagai berikut:
 - 1) Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) dengan kriteria sebagai

berikut:

Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.

- a. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/pergi/bekerja/ sekolah.
- b. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan
- c. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- d. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan kontrasepsi
- e. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

2) Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II), meliputi:

- a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
- b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging/ikan/telur.
- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- d. Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.
- e. Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan
- f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- g. Anggota keluarga umur 10 - 60 bisa, bisa baca tulis latin.
- h. PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.

3) Keluarga sejahtera tahap III, meliputi:

- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dala bentuk uang dan barang.
- c. Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.

- d. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
- e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/TV/radio.

4) Keluarga sejahtera tahap III Plus, meliputi:

- a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Adapun 5 tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS). Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (psychological needs).
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I dan 8 indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (developmental needs) dari keluarga.
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (self esteem) keluarga.

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator tahapan KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, serta 2 indikator tahapan KS III Plus.

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dengan kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Pendidikan yang dimaksud disini adalah, pendidikan yang bersifat formal maupun non-formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kesejahteraan suatu penduduk dimana tingkat pendidikan yang tinggi dapat membentuk manusia terampil dan produktif sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk (BPS Sumut, 2013).

Dengan demikian pendidikan sangat menentukan sejahtera atau tidaknya seseorang yang mana jika pendidikan tinggi maka orang tersebut memiliki keterampilan dan produktif guna menghasilkan pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tingkat kesejahteraan dipengaruhi langsung oleh pendapatan. Adanya perbedaan pendapatan dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga, tingkat pengeluaran untuk tanggungan keluarga yang besar dan tidak sama dengan tingkat pengeluaran tanggungan keluarga kecil.

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab biasanya kualitas kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan,

terbukti dari adanya salah satu peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Peraturan tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa : Tap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dari penjelasan pasal ini pemerintah memberikan petunjuk bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan, selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.

Kepedulian pemerintah akan pendidikan juga terlihat pada besarnya alokasi dana untuk pendidikan dari APBN, ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menjamin tiap-tiap warga negaranya agar mendapatkan pendidikan yang layak. Namun sayangnya hal ini tidak disadari betul oleh masyarakat, sebab masih banyak masyarakat yang menganggap pendidikan bukan hal yang utama dalam mencapai kesejahteraan hidup. Selain itu pemerintah juga tidak mengawasi betul pengalokasian dana tersebut, sebab sebagian masyarakat yang menyadari akan pentingnya pendidikan masih sulit dalam mengenyam pendidikan. Seharusnya pemerintah mengadakan pemerataan terhadap pendidikan. Pengalokasian dana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat demi tercapainya pendidikan yang memadai. Seharusnya pendidikan bukan hal yang sulit untuk di dapat ditengah era reformasi seperti ini.

Pendidikan merupakan amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat

(4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sebagai implementasi dari amanat UUD, pemerintah menerbitkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 34, disebutkan tentang ketentuan program wajib belajar, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Adapun Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pemerintah sebenarnya melalui UU Sistem Pendidikan Nasional, telah mencanangkan program wajib belajar sampai dengan usia 9 tahun atau setara dengan SMP, namun dalam kenyataannya masih banyak warga masyarakat yang menyekolahkan anak hanya sampai dengan jenjang pendidikan dasar 6 tahun.

Hal yang paling mendasar yang merupakan alasan masih rendahnya minat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar sampai dengan tingkat SMP ialah masalah pembiayaan. Sebagian besar masyarakat masih keberatan dengan biaya yang harus ditanggung untuk melanjutkan ke pendidikan SMP, meskipun untuk

pembiayaan ini, utamanya untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Maka dari itu Kebijakan Pendidikan merupakan sebagai kebijakan publik, bukan kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik. Pendidikan merupakan milik publik dan tiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Maka dari itu kebijakan pendidikan adalah program-program yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya.

D. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan secara rutin dan berkesinambungan orang dalam masyarakat.

“pelayanan merupakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha, baik melalui aktivitas sendiri, meupun secara langsung melalui aktivitas orang lain aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indra dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang secara langsung inilah yang dinamakan pelayanan”.

Moenir (2006)

Timbulnya pelayanan dari orang lain kepada seseorang yang orang lain tidak ada kepentingan langsung atas sesuatu yang orang lain tidak ada kepentingan langsung atas sesuatu yang dilakukan karena faktor penyebab yang bersifat ideal mendasar dan bersifat material.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

“Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat”. Levei dan Loamba (1973)

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit yang sasaran utamanya untuk kelompok dan masyarakat. Lingkungan pelayanan kesehatan meliputi sistem pembiayaan kesehatan, peraturan perundang – undangan, kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan, kebijakan pembiayaan dan peraturan keuangan, serta sistem regulasi kesehatan. Seluruh sistem yang berlaku di masyarakat sangat

berpengaruh terhadap sistem organisasi pelayanan kesehatan dan sistem mikro pelayanan kesehatan.

Untuk melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan, perlu diperhatikan empat tingkat perubahan (Berwick, 2002), yaitu :

1. Pengalaman pasien dan masyarakat
2. Sistem mikro pelayanan
3. Sistem organisasi pelayanan kesehatan
4. Lingkungan pelayanan kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan sangat penting untuk melaksanakan program, seperti program air bersih dan sanitasi, pelayanan klinik, dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Syarat pelayanan kesehatan yang baik setidaknya-tidaknya dapat dibedakan atas 13 macam, yakni tersedia , menyeluruh, terpadu, berkesinambungan , adil/merata, mandiri, wajar, efektif, efisien, serta bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu banyak upaya yang dapat dilaksanakan. Upaya tersebut jika- dilaksanakan secara terarah dan terencana, dalam Ilmu administrasi kesehatan dikenal dengan nama Program Menjaga Mutu (***Quality Assurance Program***). (***Buku Acuan Nasional, Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal : 17***)

1. Standar Pelayanan Minimal

pelayanan yang bermutu/berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/757 Tahun 2002, kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No. 65 Tahun 2005. Pemahaman SPM dengan baik bagi masyarakat merupakan hal yang signifikan karena- terkait dengan konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib di penuhi oleh pemerintah, yaitu berupa pelayanan publik (pelayanan dasar) yang harus dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat.

Adapun Prinsip-prinsip SPM sesuai SE Mendagri No. 100/757/OTDA, yaitu sebagai berikut :

- a. Menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib
- b. Dilaksanakan di seluruh pelayanan pemerintah
- c. Merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

E. Tinjauan Empiris

1. Penelitian ini merupakan penelitian dari wahyu prastyaningrum (2009) dengan judul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder.

Hasil simpulan dari peneliti menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan tembarak kabupaten temanggung di pengaruhi oleh beberapa variabel yang terdiri dari umur kepala keluarga, jenis kelamin kepala

keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, pekerjaan kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, jumlah keluarga usia produktif (keluarga yang bekerja). Setelah dilakukan proses reduksi dengan menggunakan software SPSS 12.0 di dapat hasil yaitu faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan di kecamatan tembarak, kabupaten temanggung dapat dikelompokkan tiga faktor yaitu faktor keluarga, faktor status sosial, faktor produktivitas.

2. Penelitian kedua yang melakukan penelitian Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bumiayu Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam di lakukan oleh Roikhatus Aflaha (2015). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan bumiayu melalui pasar tradisional perspektif ekonomi islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) di mana penyusunan akan mengumpulkan data dengan melakukan studi mendalam (*in depth study*) dengan tujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pasar tradisional perspektif ekonomi islam melalui pendekatan deskriptif-kualitatif.

Hasil dari peneliti menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan bumiayu melalui pasar tradisional sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Peran tersebut dilakukan melalui *pertama*, penciptaan jaminan sosial dengan menyediakan barang swasta dan barang publik yang pengalokasiannya dilakukan secara efisien. *Kedua*,keseimbangan sosial dengan mengalokasikan dana untuk pengelolaan

dan pengembangan pasar bumiayu. *Ketiga*, intervensi pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi yang ada di pasar bumiayu. Namun, perannya sebagai pengatur hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam system pasar.

3. Penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan di lakukan oleh Abdurrahman (2012). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi kebijakan yg dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Bacan Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Bacan Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif, dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, yaitu pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan, dokumen dan hasil-hasil penelitian serta melalui lembaga-lembaga terkait dengan masalah yang diteliti dan mengadakan pengamatan langsung objek yang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan yang dianggap memiliki kualitas dan kemampuan dalam menyikapi masalah ini.

Hasil peneliti menunjukkan bahwa yang diperoleh menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan tertuang dalam Peraturan Daerah No 06 tahun

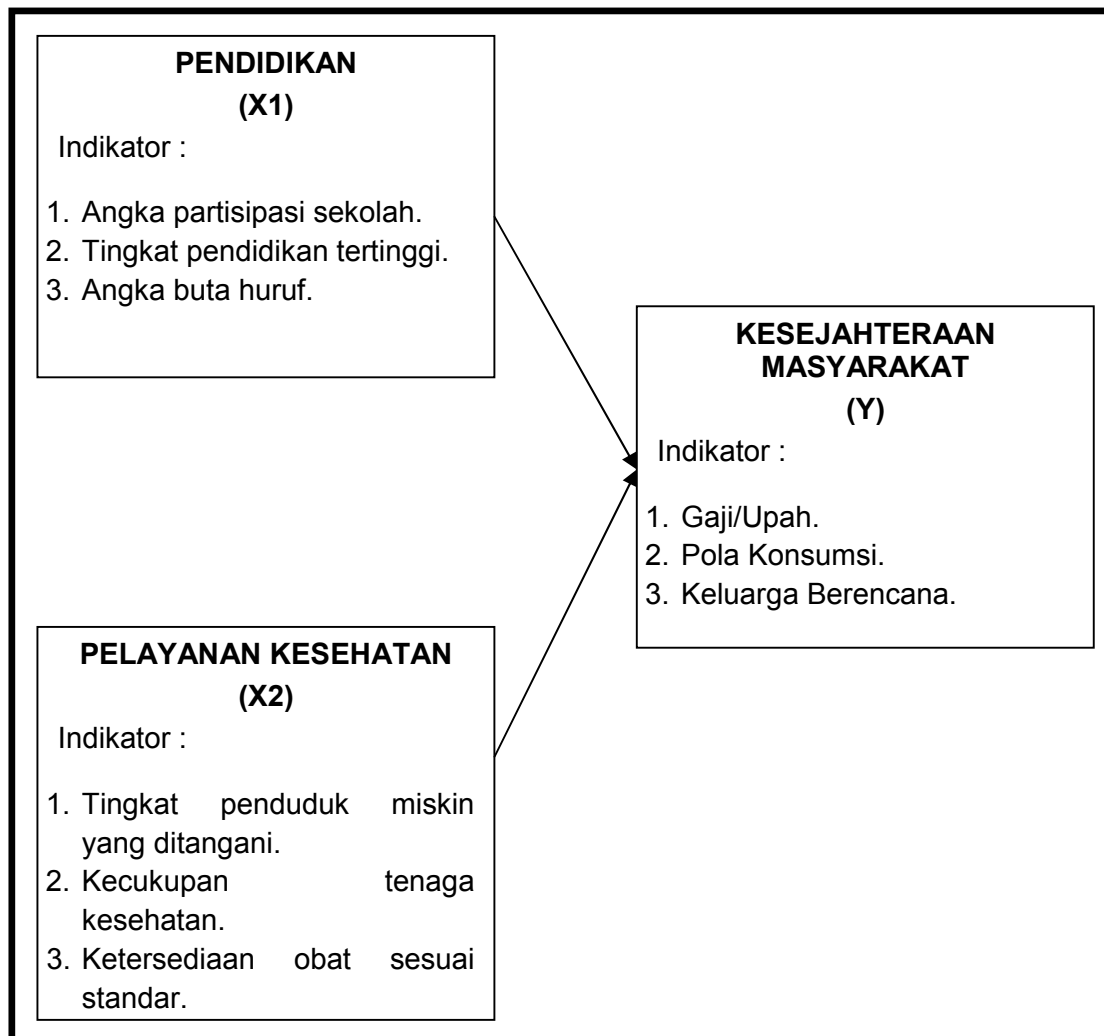
2007 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah, yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan menyeluruh kepada masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut menurut beberapa pihak pengelola Sistem Jaminan kesehatan Daerah adalah baik, tetapi dalam kenyataannya terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan kebijakan tersebut berjalan tidak sebagai mana mestinya. Faktor Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan kesehatan, disposisi/ tingkah laku aparat pelayan kesehatan, dan juga kurangnya kestabilan anggaran dalam mendukung kebijakan tersebut merupakan beberapa kendala yang mengakibatkan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya. Adapun kendala yang terjadi berada di wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota kecamatan seperti desa Belang - belang, Kaputusan, Sumae, Indomut dan Awanggo.

F. Kerangka Konsep

Thomas R. Dye mengatakan Kebijakan pemerintah itu adalah apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya. (Soenarko, 2003).

Pendidikan sangat menentukan sejahtera atau tidaknya seseorang yang mana jika pendidikan tinggi maka orang tersebut memiliki keterampilan dan produktif guna menghasilkan pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pelayanan kesehatan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejahterahnya masyarakat dalam hal kesehatan yaitu dengan melihat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah dengan menerapkan standar pelayanan minimal yang merupakan suatu istilah dalam pelayanan public (*public policy*) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan public sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, yang mana jika pelayanan kesehatan baik maka masyarakat akan puas.



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

H. Hipotesis

1. Diduga pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Diduga pelayanan kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari segi pendekatan di bagi menjadi dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Pendekatan deskriptif-kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numeral (angka) yang diolah dalam metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang di teliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai objek penelitian dengan alasan desa tersebut merupakan desa yang memiliki penduduk terbanyak di Kecamatan Mowila. Waktu penelitian di lakukan terhitung mulai Februari sampai dengan April 2018.

C. Definisi operasional variable (DOV)

Operasionalisasi penelitian ini dibagi kedalam dua variabel, yaitu variabel independent dan variabel dependent :

- 1) Variabel independent

Variabel independent adalah variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya (terpengaruhnya) variabel dependent (variabel tak bebas).

Variabel independent dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendidikan (X1), adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dan dapat diartikan juga sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Pendidikan di kategorikan menjadi 2 yaitu pendidikan formal dan non-formal.
- b. Pelayanan Kesehatan (X2), yaitu upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan. Pelayanan kesehatan terdiri dari 2 bentuk pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

2) Variabel dependent

Variabel dependent adalah variabel tak bebas yang itu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Masyarakat (Y). kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan

fungsi sosialnya, bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup. (Undang-undang republik Indonesia No. 11 tahun 2009).

3) Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini variabel menggunakan skala pengukuran likert dimana :

Ya/Sangat Baik : 4, Sedang/Baik : 3, Cukup baik : 2, Tidak baik : 1

D. Populasi dan Sampel

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel

Desa Wonua Monapa

NO	DUSUN	JUMLAH	
		POPULASI	SAMPEL
1	Dusun 1	256	29
2	Dusun 2	162	18
3	Dusun 3	234	27
4	Dusun 4	131	15
JUMLAH		783	89

Rumus yang di gunakan dalam menentukan sampel ialah menggunakan rumus slovin :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + n(e)^2} \\
 &= \frac{793}{1 + 793(0,1)^2} \\
 &= \frac{793}{1 + 793(0,01)} \\
 &= \frac{793}{1 + 7,93} \\
 &= \frac{783}{8,83} = 89.
 \end{aligned}$$

E. Teknik pengumpulan data

a. Sumber Data

1. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah para pejabat dan instansi terkait :

- 1) Kepala puskesmas Mowila
- 2) Kepala desa Wonua Monapa
- 3) masyarakat yang tersebar di desa Wonua Monapa.

Teknik penentuan informan yang dipakai yaitu nonprobability sample, dimana jenis penarikan sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling dengan dasar pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah kelompok yang dianggap profesional dalam lingkup pemerintah.

b. Survey

c. Wawancara/quisioner

d. Dokumentasi

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode statistika untuk keperluan estimasi. Dalam metode ini statistika alat analisis yang biasa dipakai dalam khasanah penelitian adalah analisis regresi. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang tergantung pada variabel yang lain yang di sebut dengan variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dengan meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai tertentu dari variabel yang diketahui.

Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis inferensial, yaitu analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots(1)$$

Secara eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi Cobb-Douglas berikut:

$$Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} e^{\mu} \dots\dots\dots(2)$$

Untuk mengestimasi koefisien regresi, Feldstein (1988) mengadakan transformasi ke bentuk linear dengan menggunakan logaritma natural (ln) guna menghitung nilai elastisitas dari masing-masing variabel bebas terhadap variable terikat ke dalam model sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Dimana	:
Y	= Kesejahteraan Masyarakat
X1	= Pendidikan
X2	= Pelayanan Kesehatan
β_0	= Konstanta
β_1 - β_3	= Parameter
μ	= Error Term

1. Uji Validitas & Uji Reliabilitas

a. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kesamaan antar data yang dikumpulkan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang valid. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan (mengukur) fakta itu juga valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (sugiyono :1999).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas, atau keandalan, adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama (tes dengan tes ulang) akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip (reliabilitas antar penilai). Reliabilitas tidak sama dengan validitas. Artinya pengukuran yang

dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linear yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasanya dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Adapun asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik, yaitu sebagai berikut:

a. Uji normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi titik valid untuk jumlah sampel kecil. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya.

b. Uji multikolinieritas data

Uji multikolinieritas perlu dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas (MULTIKO). Untuk mengetahui multikolinieritas antar variabel bebas tersebut, dapat dilihat melalui VIF (*variance inflation factor*) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai VIF tidak lebih dari 5 berarti mengindikasikan bahwa dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

1) Uji analisis regresi berganda

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial, serta menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

a) Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 menjelaskan seberapa besar peranan variabel independen terhadap variabel dependen, semakin besar R^2 semakin besar peranan

variable dalam menjelaskan variable dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1.

b) Uji F Statistik

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel *independent* secara signifikan terhadap variabel *dependen*. Dimana jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima atau variabel *independent* secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel *dependen* (tidak signifikan) dengan kata lain perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, dimana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5 %. Untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang di gunakan dalam model regresi secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap variable yang dijelaskan, digunakan uji statistik F, hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0 : \alpha_1, \alpha_2, \dots = 0$ semua variabel independen tidak mempengaruhi variable dependen secara bersama-sama.

$H_1 : \alpha_1, \alpha_2, \dots \neq 0$ semua variabel independen mempengaruhi variable dependen secara bersama-sama.

c) Uji t Statistik

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variable bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel *independent* dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variable *dependent* secara nyata. Dimana jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

H1 diterima (signifikan) dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ H0 diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Wonua Monapa merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Mowila yang secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dengan luas wilayah 869 Ha. Desa Wonua Monapa merupakan tanah datar dan berbukit dengan lokasi wilayah sbb :

Secara administratif wilayah Desa Wonua Monapa berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Langgonawe Kec.Puriala
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rakawuta
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wuura
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Landabaro Kec.Angata

2. Struktur Penduduk

Penduduk Desa Wonua Monapa berdasarkan data penduduk tahun 2017 berjumlah 783 jiwa yang terdiri dari laki laki 398 jiwa dan perempuan 385 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 131 yang terdiri dari 4 dusun.

Jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Wonua Monapa Akhir Bulan Desember Tahun 2017.

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk Akhir Bulan Desember (jiwa)			Jumlah Kepala Keluarga		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Dusun I	142	114	256	20	12	32
2	Dusun II	72	90	162	16	12	28
3	Dusun III	120	114	234	20	10	30
4	Dusun IV	64	67	131	15	8	23
Jumlah		398	385	783	71	42	113

Sumber: *Data Desa Wonua Monapa, Tahun 2017*

Keterangan: L = Laki-laki

P = Perempuan

3. Kondisi Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal utama pembangunan bangsa. Dalam hal ini, tingkat pendidikan yang diterima oleh suatu masyarakat yang memiliki pendidikan formal maupun non formal yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak lebih dinamis dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah atau tidak memiliki pendidikan sama sekali. Adapun keadaan penduduk Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Menurut Ijazah Yang Ditamatkan

No	Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tidak tamat SD	90	94
2	Tamat SD/Sederajat	169	146
3	Tamat SLTP/SMP	56	65
4	Tamat SLTA/SMA	49	51
5	Tamat D-1	-	-
6	Tamat D-2	-	-
7	Tamat D-3	-	4
8	Tamat S-1	2	-
9	Tidak Bersekolah	32	25
Jumlah		398	385

Sumber: *Data Desa Wonua Monapa, Tahun 2017*

Pada tabel 4.2 diatas, klarifikasi penduduk Desa Wonua Monapa menurut ijazah yang di tamatkan berdasarkan jenis kelamin, dengan jumlah laki-laki sebanyak 308 orang dan perempuan sebanyak 291. Adapun jumlah masyarakat dari kalangan laki-laki yang berhasil memperoleh ijazah SD/Sederajat sebanyak 201 orang sedangkan perempuan sebanyak 171 orang, laki-laki yang memperoleh ijazah SLTP/SMP sebanyak 56 orang sedangkan perempuan sebanyak 65 orang, pada jenjang SLTA/SMA laki-laki sebanyak 49 orang sedangkan perempuan sebanyak 51 orang. Sementara masyarakat yang sempat menyelesaikan pendidikan ijazah diploma keatas, laki-laki yaitu sebanyak 2 orang sedangkan perempuan sebanyak 4 orang, sedangkan yang tidak bersekolah yaitu laki-laki sebanyak 32 orang dan perempuan sebanyak 25 orang.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang segala aktifitas kehidupan, baik sarana dan prasarana dibidang sosial maupun bidang ekonomi. Mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Wonua Monapa dapat dilihat pada table 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana di Desa Wonua Monapa

No	Jenis Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah (Unit)
1	Masjid	1
2	Posyandu	1
3	Polindes	1

Sumber Data Primer Tahun 2018

c. Budaya dan Agama

Kebudayaan masyarakat dalam suatu daerah adalah bagian dari modal sosial dan pondasi utama dalam pembangunan. Sehingga pemahaman akan kebudayaan suatu masyarakat secara terpadu dan komprehensif merupakan suatu keharusan agar pembangunan yang tercipta tidak bertentangan dengan kearifan local masyarakat suatu daerah.

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Wonua Monapa adalah agama Islam. Selanjutnya terdapat beberapa suku yang mendiami Desa Wonua Monapa yaitu Tolaki, Jawa, Bali.

4. Kondisi Perekonomian

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Wonua Monapa adalah Petani. hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan

masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi petani.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 89 responden di Desa Wonua Monapa yang di analisis secara regresi dan diuji statistik pula untuk membuktikan hipotesis yang di ajukan peneliti. Variabel yang diteliti adalah pendidikan dan pelayanan kesehatan sebagai variabel bebas dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel terikatnya. Lebih rinci hasil penelitian terhadap ketiga variabel akan dipaparkan di bawah ini.

Ketika responden mengisi angket/kuesioner, responden tersebut di damping oleh peneliti supaya ketika responden ingin bertanya dan ada yang kurang jelas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam angket yang telah disediakan, responden dapat bertanya kepada peneliti dan sebaliknya peneliti dapat tanya jawab dengan responden.

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

NO	Variabel Bebas (X)	unstandardized	t-hitung	significant	f-hitung
1	Pendidikan (X ₁)	0.064	0.495	0.622	7.728
2	Pelayanan Kesehatan (X ₂)	0.487	3.595	0.001	
$Y = 0.711$ $R_{\text{Square}} = 0.152 \quad F_{\text{Tabel}} = 3.95$ $T_{\text{Tabel}} = 1.663$					

Sumber: *Data diolah Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 4.4, maka persamaan fungsi regresi linier berganda sbb :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

$$Y = 0.711 + 0.064X_1 + 0.487X_2$$

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.152 yang berarti bahwa variabel tidak bebas (Y) pada model dijelaskan oleh variabel bebas (X) secara bersama-sama sebesar 15.2 %. Sisanya 84.8% di pengaruhi oleh variabel bebas lainnya salah satunya adalah pendapatan masyarakat.

Berdasarkan tabel dapat diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf kepercayaan 95% ($7.72 > 3.95$) yang berarti variabel bebas secara keseluruhan (simultan) berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara parsial pengaruh penggunaan masing-masing variabel terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai t_{hitung} dan koefisien regresi adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan (X_1)

Pada umumnya Manusia yang sejahtera adalah manusia yang berpendidikan. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan. Seorang yang berpendidikan akan lebih mudah memperoleh pekerjaan yang lebih baik jika dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0.495 dan t_{tabel} sebesar 1.663 maka, $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.495 < 1.663$), artinya secara parsial variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila.

Dengan demikian Semakin besar pengeluaran untuk pendidikan semakin besar pula peluang untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin kecil pengeluaran untuk pendidikan akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan karena seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan dengan biaya yang cukup mahal. Hal ini menunjukkan

bahwa pendidikan dan kesejahteraan masyarakat berhubungan positif. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Semakin rendah jenjang pendidikan, akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun. (ndakularak.dkk:2014)

Fakta di tempat penelitian bahwa rata-rata responden mengatakan bahwa pendidikan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena, walaupun mereka mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi pekerjaan mereka tetap sama yaitu bertani atau tidak memiliki pekerjaan, selain itu mereka tetap masih kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dengan ijazah yang mereka punya. Inilah mengapa di desa Wonua Monapa tingkat pendidikannya masih sangat rendah dan kemauan untuk bersekolah sangat rendah ini di karena kan juga jarak tempuh antara rumah dan sekolah cukup jauh, mereka harus melewati 2 desa untuk mendapatkan sekolah (SD) sedangkan jarak tempuh untuk sampai ke sekolah (SLTP) harus melewati 4 desa.

2. Pelayanan Kesehatan (X_2)

Kesejahteraan masyarakat tidak saja dilihat dari tingkat pendidikan tetapi juga dilihat dari tingkat kesehatan. Seseorang yang berpendidikan tinggi tidak akan bermanfaat apabila tidak sehat, begitupun sebaliknya seseorang yang sehat belum tentu sejahtera jika tidak berpendidikan.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3.595 dan t_{tabel} sebesar 1.663 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.595 > 1.663$). artinya secara parsial berpengaruh nyata variabel pelayanan kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian berkualitas atau tidaknya kesehatan seseorang sangat tergantung dari kemampuan seseorang untuk menjangkau layanan kesehatan. Untuk menjangkau layanan kesehatan diperlukan biaya yang cukup. Besar kecilnya biaya sangat bergantung dari jumlah pengeluaran. Semakin besar jumlah pengeluaran untuk kesehatan, semakin baik pula derajat kesehatan seseorang sehingga berdampak pada kesejahteraan. Semakin kecil jumlah pengeluaran untuk kesehatan, semakin rendah pula derajat kesehatan seseorang yang akan berdampak pada menurunnya kesejahteraan. Oleh karena itu pelayanan kesehatan berhubungan positif dengan kesejahteraan masyarakat. (ndakularak,dkk:2014)

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan uji t variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.495 < 1.663$), dengan nilai signifikan $0.662 > 0.05$
- b. Berdasarkan uji t variabel pelayanan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.595 > 1.663$), dengan nilai signifikan $0.001 < 0.05$.

2. Saran

Saran yang dapat penyusun sampaikan berdasarkan simpulann di atas adalah :

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila pemerintah daerah harus lebih giat menginformasikan kepada masyarakat bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kesejahteraan suatu keluarga.
- b. Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta layanan pendidikan gratis dan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2012). *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan*.
- Aflaha, R. (2015). *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bumiayu Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam*.
- Bakry, Aminuddin. 2010. *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- BKKBN, 2014. *Pedoman Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Pendataan keluarga*. Sumatera Utara : Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional. BPS Sumut. 2013. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara*. Badan Pusat Statistik. Sumatera Utara.
- Everst, S. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta : CV Rajawali
- Fanar Syukuri Agus, 2010. *Standar Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*.
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005).
- Horton dan Hunt (1987 : 59), lihat dalam Damsar, dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Indonesia Quality Research Agency (IQRA). *Kreasi Wacana*. Tangerang, Banten.
- Nurkolis Kendala. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Nanang Fattah. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Nasikun. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Ndakularak, E., Setiawina, N.D., dan Djayastra, I.K., 2014. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*.
- Parsons, USA: Wayne.1997. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar Publishing Limited UK. Edward Elgar Publishing Inc.

- Prabawa, S. 1998. Sumberdaya Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Studi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. Tesis (tidak diterbitkan). Fakultas pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Prastyaningrum, W. 2009. Analisis faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
- Rambe, Armaini. 2011. Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara). Tesis (tidak diterbitkan). Medan : Universitas Sumatera Utara.
- R.I., Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan sosial.
- R.I., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang “Sistem Pendidikan Nasional”, Pasal 34, ayat 2 dan ayat 3.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Subarsono, AG, 2006, Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Subarsono AG, 2006. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Syafiie Kencana Inu M.Si Drs, 2003. Sistem Administrasi Negara. Bumi Aksara. Bandung
- Sumardi. 1982. Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok dan Perilaku Menyimpang. Jakarta : Rajawali.
- Suyoto, Agustinus. 2004. Konsep keluarga kreatif Sebagai Alternatif Perwujudan Keluarga Yang Sejahtera Dan Mandiri Di Era Globalisasi. Esai/Artikel Pemenang Harapan II Lomba Karya Tulis Keluarga Nasional XI 2004. BKKBN Wilayah DIY (tidak dipublikasikan). (<https://agsuyoto.files.wordpress.com>)
- Soenarko, H. *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University. 2003.
- Todaro, Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh Jilid I. Jakarta : Erlangga.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan Kab/Kota.

INTERNET :

<https://silabus.org/pengertian-pendidikan/>

www.menkokesra.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Responden di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	pendidikan terakhir	pekerjaan	Dusun
1	sino	L	51	TS	petani	dusun 1
2	lewa	L	37	SLTP	swasta	dusun 1
3	hendra	L	32	SD	petani	dusun 1
4	minaala	L	58	SD	petani	dusun 1
5	sudin	L	40	SD	petani	dusun 1
6	labuasi	L	40	SD	petani	dusun 1
7	wawan	L	24	SLTP	petani	dusun 1
8	lapanusi	L	66	SD	petani	dusun 1
9	murwan	L	44	SD	petani	dusun 1
10	lopa	L	36	SD	petani	dusun 1
11	soni	L	29	SD	petani	dusun 1
12	ambogani	L	40	SD	petani	dusun 1
13	rudi	L	37	SD	petani	dusun 1
14	raesi	L	58	TS	petani	dusun 1
15	sumi	P	59	SD	IRT	dusun 1
16	suhendi	L	40	SD	petani	dusun 1
17	rudin	L	40	SD	petani	dusun 1
18	sunu	L	71	TS	petani	dusun 1
19	nurlian	P	53	TS	petani	dusun 1
20	ruhan	L	24	SD	petani	dusun 1
21	pandawa	L	61	TS	petani	dusun 1
22	ratna saputri	P	24	SLTA	swasta	dusun 1
23	jamaluddin	L	45	SD	petani	dusun 1
24	parman	L	38	SD	petani	dusun 1
25	pasawula	L	38	SD	petani	dusun 1
26	alidin siho	L	22	SLTA	petani	dusun 1
27	nasrun	L	28	SD	petani	dusun 1
28	markus	L	29	SD	petani	dusun 1
29	rudi	L	37	TS	petani	dusun 1
30	didin	L	34	SD	petani	dusun 2
31	emi	P	83	SD	IRT	dusun 2
32	nurdin	L	62	TS	petani	dusun 2
33	gunawan	L	23	SD	petani	dusun 2
34	pikal	L	26	SD	petani	dusun 2
35	duma	L	52	TS	petani	dusun 2
36	Sali	L	36	SD	petani	dusun 2
37	mani	L	58	TS	petani	dusun 2
38	pial	L	45	SD	petani	dusun 2

Lampiran 1 : Data Responden di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila

39	edi	L	34	SD	petani	dusun 2
40	damina	P	38	TS	IRT	dusun 2
41	nasrah	P	32	SD	IRT	dusun 2
42	tuke	P	29	TS	IRT	dusun 2
43	ida	P	38	SD	IRT	dusun 2
44	kapa	P	35	SLTA	IRT	dusun 2
45	nurmila	P	29	SLTP	IRT	dusun 2
46	harun	P	48	TS	IRT	dusun 2
47	desti ananta	P	22	SLTA	IRT	dusun 2
48	gede sudiro	L	63	SD	petani	dusun 3
49	niluh rempini	P	49	SD	IRT	dusun 3
50	kadek soko	P	49	SD	IRT	dusun 3
51	sayu sami	P	39	SD	IRT	dusun 3
52	made arumini	P	48	SD	petani	dusun 3
53	ketut suardi	P	55	SD	petani	dusun 3
54	ni nyoman sukeni	p	46	SD	IRT	dusun 3
55	rukmino wangsih	P	53	SD	IRT	dusun 3
56	made isis	P	58	SD	IRT	dusun 3
57	komang ardiawan	L	38	SD	petani	dusun 3
58	ketut darmini	P	50	SLTA	IRT	dusun 3
59	made martini	P	51	SD	IRT	dusun 3
60	ni putu dewiyani	P	34	SLTA	IRT	dusun 3
61	ketut wani	P	46	SLTA	IRT	dusun 3
62	niluh swiyani	P	37	SLTP	IRT	dusun 3
63	ketut sutiayani	L	52	SD	petani	dusun 3
64	made nilawati	P	32	SD	IRT	dusun 3
65	made rampo	P	66	TS	IRT	dusun 3
66	misgiyati	P	39	SD	IRT	dusun 3
67	tuminem	P	55	SD	IRT	dusun 3
68	sujiyati	P	42	SD	IRT	dusun 3
69	sutini	P	79	TS	IRT	dusun 3
70	dimas	L	28	SLTA	petani	dusun 3
71	suryani	P	38	SD	IRT	dusun 3
72	sripih	P	37	SD	IRT	dusun 3
73	nurhasin	L	44	SD	petani	dusun 3
74	ansar	L	47	SLTP	petani	dusun 3
75	husna	P	38	SD	petani	dusun 4

Lampiran 1 : Data Responden di Desa Wonua Monapa Kecamatan Mowila

76	kadir	L	49	SD	petani	dusun 4
77	rahmatia	P	38	SD	IRT	dusun 4
78	nurdin t	L	65	SD	petani	dusun 4
79	tini	P	45	SD	IRT	dusun 4
80	dupa	L	48	SD	petani	dusun 4
81	nurhaya	P	27	SLTP	TK	dusun 4
82	udin	L	34	SD	petani	dusun 4
83	kasmawati	P	27	SLTP	IRT	dusun 4
84	debora	P	47	SD	IRT	dusun 4
85	aldo	L	25	SD	TK	dusun 4
86	arpin	L	41	SLTP	petani	dusun 4
87	rohani	P	39	SLTP	IRT	dusun 4
88	maroa	L	29	TS	petani	dusun 4
89	anti	P	28	SD	TK	dusun 4

Lampiran 2 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pelayanan Kesehatan, Pendidikan ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.390 ^a	.152	.133	.39253

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Kesehatan, Pendidikan

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.381	2	1.191	7.728	.001 ^b
	Residual	13.251	86	.154		
	Total	15.632	88			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Kesehatan, Pendidikan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.711	.496		1.434	.155		
	Pendidikan	.064	.130	.051	.495	.622	.918	1.089
	Pelayanan Kesehatan	.487	.135	.373	3.595	.001	.918	1.089

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

PETA WILAYAH KECAMATAN MOWILA

 **PETA WILAYAH KERJA SENSUS PENDUDUK KECAMATAN MOWILA**



DOKUMENTASI



Gambar1. Perbatasan desa wonua monapa dan desa wuura



Gambar2. Pemukiman Warga



Gambar3. Mesjid di Desa Wonua Monapa



Gambar4. Infrastruktur jalan di Desa Wonua Monapa



Gambar5. Pengisian Angket/Kuesioner di rumah masyarakat



Gambar6. Pengisian Angket/Kuesioner.

RIWAYAT HIDUP



Ajeng Sintya Ambarwati lahir di Kendari pada tanggal 11 Oktober 1996. Anak pertama dari tiga bersaudara hasil buah kasih dari pasangan Muhammad Aminuddin dengan Mirawati Sultan SsT. Pendidikan formal yang dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 11 Poasia dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Kendari dan lulus pada tahun 2011 dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Kendari dan lulus pada tahun 2014 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan selesai pada tahun 2018 dengan gelar Sarjana Ekonomi. Pengalaman organisasi yang pernah dimasuki adalah OSIS, Sanggar Seni, HMJ IESP.